

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsepsi tentang Surat Kabar (Pers)

Pers adalah sebutan bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang berkaitan dengan media massa atau wartawan. Sebutan ini bermula dari cara kerjanya media cetak yang awalnya menekankan huruf-huruf di atas kertas yang akan dicetak. Dengan demikian, maka segala barang yang dikerjakan dengan mesin cetak disebut pers. Dalam perkembangannya istilah ini diberi pengertian dengan penerbitan pers.<sup>1</sup>

Berdasarkan tinjauan etimologi atau sejarah asal usul kata, pers berasal dari bahasa Belanda, pers berarti menekan atau mengepres. Selain pengertian itu ada yang menyebutkan, bahwa pers itu padanan kata dari Inggris "*perss*". Kata "*pers*" berasal dari bahasa Belanda, sedangkan kata "*press*" dari Inggris dan Amerika Serikat. Antara kata "*pers*" dan "*press*" mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama menekan atau mengepres.

---

<sup>1</sup>Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 206.

tua dan sudah mencakup semua, lebih dari teori dan filsafat komunikasi massa).<sup>4</sup>

Jelaslah kiranya menurut penjelasan F.S. Siebert cs bahwa pers dalam arti yang lebih luas mencakup (dalam arti yang lebih luas) segala media komunikasi massa. Dalam arti sempit pers itu identik dengan surat kabar. Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut teori komunikasi massa antara lain:

a. Publisita

Yaitu penyebaran kepada publik pembaca, umum atau khalayak ramai. Semua orang yang ingin mengetahui/membacanya dapat menerima (membeli) dan kalau menjadi lebih besar/lebih meningkat maka produksi/penerbitan dapat lebih diperbesar menurut kebutuhan.

b. Priodisita

Yaitu surat kabar harus terbit pada periode-periode tertentu, umpanya seminggu sekali atau beberapa kali dalam sehari dan atau sehari sekali (ada edisi pagi, edisi sore atau malam).

Disinilah kita melihat perbedaan antara

-----

<sup>4</sup>T.A. Lathief Rousydiy, *Dasar-dasar Rhetorica Komunikasi dan Informasi*, Cet. II, Medan, 1989, hal. 119.

penerbitan surat kabar dengan penerbitan yang bukan surat kabar, seperti penerbitan sebuah buku. Surat kabar memenuhi syarat priodisita sedang buku tidak memenuhi syarat ini, karena buku mungkin hanya diterbitkan satu kali saja dan tidak periodik.<sup>5</sup>

c. Universalita

Yaitu yang bertalian dengan bentuk/isi surat kabar. Universalita mengandung pengertian bahwa isi surat kabar haruslah beraneka ragam, harus meliputi beberapa aspek dan segi dari kehidupan manusia. Isi surat kabar semestinya ada yang menyangkut masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, ilmiah, dan keagamaan dan lain-lain.

Surat kabar hanya dapat dikatakan surat kabar kalau isinya bersifat universal. Sebuah bulanan teknik umpunya tidak dinamakan surat kabar, karena syarat publisita dan priodisita dapat dipenuhi, tetapi syarat universalita tidak dipenuhi sebab majalah tersebut hanya memuat masalah teknik saja, salah satu aspek daripada kehidupan manusia.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 120

a. To inform

Pers mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat pembaca melalui tulisan-tulisan pada setiap edisinya, pers memberi informasi yang beraneka ragam, dengan membaca surat kabar audience dapat memperoleh bermacam informasi baik itu yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Karena pers memberikan kabar atau informasi tersebut, maka pers berarti mempunyai fungsi informasi.<sup>7</sup>

b. To educate

Pers mempunyai fungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan yang dimuatnya, pers bisa mendidik masyarakatnya atau audience pembacanya. Dengan demikian pers mempunyai andil yang penting dalam memberikan pendidikan pada masyarakat/bangsa.

c. To controle

Pers di tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial (sosial controle) dengan tulisan-tulisannya, pers bisa melaksanakan atau memberikan kontrol sosial, memberikan berbagai

---

<sup>7</sup>Widodo, *Op.Cit.*, hal. 7

kritik yang bersifat membangun yang berguna bagi masyarakatnya secara luas. Melalui tulisan-tulisannya, bisa menyajikan kritik atau controle terhadap pihak-pihak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dinilai bisa merugikan masyarakat luas. Pers khususnya mempunyai pengaruh yang sangat besar/luas dan juga mempengaruhi pendapat umum (public opinion) karena kuatnya pengaruh pers tersebut, maka pers merupakan kekuatan keempat setelah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pers.<sup>8</sup>

d. To bridge

Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani (to bridge) antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya komunikasi-komunikasi yang tidak disalurkan melalui jalur kelembagaan yang ada, bisa disampaikan melalui pers karena sebagai perantara itulah, maka pers disebut mempunyai fungsi penghubung.

e. To entertaint

Pers melalui tulisan-tulisannya, bisa memberikan hiburan (to entertaint) kepada masyarakat menghibur di sini bukan hanya dalam pengertian yang lucu

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 8

saja. Melainkan juga memberikan kepuasan, kesenangan-kesenangan, keberhasilan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Di samping fungsi pers sebagaimana yang tersebut di atas, fungsi pers pada zaman modern ini tidak hanya mengelola berita, tetapi juga berfungsi mendidik, menghibur dan mempengaruhi agar massa pembaca melakukan suatu tindakan dan kegiatan tertentu.<sup>10</sup>

Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi menyiarkan berita

Fungsi utama dan pertama setiap surat kabar adalah menyiarkan informasi. Orang banyak berlangganan surat kabar adalah ingin mengetahui dan mendapatkan informasi tentang berbagai peristiwa yang terjadi dipermukaan bumi, gagasan atau fikiran orang lain, apa yang dilakukan, diucapkan, dilihat oleh orang lain dan lain sebagainya.

b. Fungsi pendidik

Surat kabar adalah merupakan sarana pendidikan massa (Mass Education). Surat kabar memuat dan

---

<sup>9</sup> *ibid.*, hal.

<sup>10</sup> T.A. Lathief Rousyidiy, *Op.Cit.*, hal. 123

menyiarkan tulisan-tulisan yang bercorak ilmu pengetahuan. Secara implisit dalam bentuk berita dan secara eksplisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana atau ulasan berita. Bahkan bisa juga melalui cerita bersambung (cerbung) atau cerita bergambar (cergam) yang isi dan temanya mengandung aspek pendidikan.<sup>11</sup>

c. Fungsi mempengaruhi

Fungsi ini sangat pentingnya, sehingga Napoleon Bonaparte pada masa jayanya pernah menyatakan bahwa ia lebih takut kepada empat surat kabar daripada seratus serdadu dengan sangkur terhunus.

Fungsi mempengaruhi dari surat kabar terdapat secara implisit pada berita yang disajikannya. Sedangkan secara eksplisit terdapat pada artikel, tajuk rencana yang umumnya berisi opinion dari penulisnya.<sup>12</sup>

Sebaliknya, apabila memasang iklan pada media tercetak seperti surat kabar atau majalah, dalam ilustrasinya mencantumkan juga gambar kemasan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 124

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 124

(package) barang yang diiklankan.<sup>13</sup> Sementara pengaruhnya dalam bidang perdagangan atau perusahaan dapat terlihat dalam iklan-iklan yang sengaja dimuat berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan. Demikian fungsi surat kabar, dan di dalam mengelola fungsi yang demikian diperlukan kebijaksanaan disamping keberanian untuk menjaga keseimbangan antara segi pemasaran atau komersial yang menjadi titik perhatian direksi dengan segi ideal yang menjadi prinsip dan pegangan pihak redaksi.<sup>14</sup>

Filsafat yang merupakan tata nilai didasarkan pada pola pemikiran atau ideologi suatu bangsa. Falsafah merupakan sikap/cara hidup *Way of Life* yang dimanifestasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara oleh bangsa-bangsa di dunia akan ikut mewarnai atau menentukan corak, warna, sistem pers nasionalnya.<sup>15</sup>

Para ahli periklanan yang mahir dalam penggunaan media untuk mempengaruhi masyarakat, meyakini pengaruh yang luar biasa, peran pers terhadap masyarakat.

---

<sup>13</sup>Onong Uchjana Efendi, *Human Relation dan Public relation*, Mandar Maju, Cet. VIII, Bandung, 1993, hal. 19

<sup>14</sup>T.A. Lathief Rousydiy, *Loc.Cit.*, hal. 125

<sup>15</sup>Widodo, *Op.Cit.*, hal. 9

Sekalipun demikian, dari studi-studi tentang pengaruh (effect study) ternyata pers tidak punya daya untuk mempengaruhi secara langsung. Pada awalnya pers mempengaruhi pemimpin opini (opinion leader), baru kemudian pemimpin opini mempengaruhi masyarakat luas. misalnya pada kampanye pemasaran yang dilakukan oleh Unilever, yang menggunakan media massa, ternyata masih harus didukung oleh para petugas penjualan yang mendatangi dari rumah ke rumah. Selain dari pers yang mempengaruhi pembaca atau masyarakat pembaca, sebaliknya masyarakat pembaca juga mempengaruhi pers. Pemberitaan pers pada dasarnya berdasarkan kepentingan dan minat masyarakat pembaca.<sup>16</sup>

Di dunia ini terdapat bermacam-macam ideologi yang dianut oleh suatu negara. Ideologi atau falsafah tersebut, nantinya akan mempengaruhi di sistem pers yang dianutnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini digambarkan secara ringkas mengenai sistem pers di beberapa negara.

---

<sup>16</sup>Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedia Pers Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 199

Adapun sistem pers itu terdiri atas:

a. Sistem pers kapitalis

Di negara-negara yang menganut paham kapitalisme maka sistem pers yang dianut berjalan seiring dengan ideologi nasionalisnya. Eksistensi pers di tengah masyarakat berfungsi untuk mendukung mensport kapitalisme itu sendiri. Sebagai gambaran saja falsafah yang dianut oleh orang-orang Amerika mereka berpangkal pada kepentingan individualisme atau atas dasar kepentingan perorangan yang sangat tinggi corak sistem falsafah semacam itu senada dengan yang dianut oleh JJ. Rousseau dari Perancis dalam kehidupan bernegara yang berfalsafahkan cara kapitalisme, maka terbuka peluang lebar berlakunya hukum rimba *Homo Homini Lupus* yaitu siapa yang kuat dialah yang menang.<sup>17</sup> Demikian pula terhadap lembaga pers, di negara kapitalisme, pers diselenggarakan pihak swasta pemilik modal, maka negara atau pemerintah sulit untuk mengadakan atau memberi kontrol terhadap pers, mengingat berdirinya atau eksistensi pers karena membutuhkan dukungan modal maka melalui lembaga itu pula pemilik modal

---

<sup>17</sup>Widodo, *Loc.Cit.*, hal. 9

menghendaki adanya pengembalian modal.

b. Sistem pers liberal

Sistem pers liberal/libertarian dianut oleh negara-negara yang berfaham liberal seperti Inggris, Australia dan negara lainnya. Di negara yang menganut sistem pers liberal, kehidupan pers itu berkembang secara pesat, perkembangan itu sendiri jika ditinjau dari pertumbuhan pers, sebab di negara penganut pers liberal yang namanya kebebasan pers (freedom of the pers) adalah benar-benar bebas secara mutlak, tanpa batas, terutama sekali dalam hal pemberitaan, peran wartawan atau surat kabar, majalah, media elektronik seperti radio, TV secara bebas, baik itu kontrol kritik ditujukan kepada pemerintah, pejabat lembaga atau perorangan. Satu misal antara Indonesia dengan Australia yang mulai membina kemitraan yang harmonis seringkali dijengkelkan oleh berita-berita pers yang ditulis oleh para wartawan di Australia. Hal seperti itu dianggap kejadian yang wajar di negara liberal dan sebagai hal yang biasa-biasa saja, sebab dalam pers liberal pemerintah tidak bisa mengendalikan pers. Dengan demikian tulisan atau kehendak wartawan bukanlah pencerminan sikap pemerintahnya,

permodalan dalam sistem pers liberal demikian merupakan campuran. Artinya ada modal yang dikeluarkan oleh pemerintah ada pula yang modal swasta sebab sesuai dengan aturannya pihak swasta bisa mendirikan usaha di bidang pers, yang dijamin oleh Undang-undang yang syah, demikian pula pemerintah juga bisa mendirikan usaha di bidang pers seperti yang dilakukan pihak swasta/pemilik modal.

c. Sistem pers komunis

Negara-negara yang berpaham komunis, maka sistem persnya akan komunis pula. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa bagian Timur yang kebanyakan komunis. Lembaga pers merupakan alat perjuangan bagi berdiri atau kokohnya paham komunis. Demikian pula pemberitaan mencerminkan manifestasi dari ideologi atau nilai-nilai komunis. Pers merupakan lembaga pemerintah dan bibiyai oleh pemerintah, mengingat modal, penyelenggara pemerintah maka pers di negara-negara berpaham komunis merupakan alat atau ajang perjuangan pemerintah. Dalam pers komunis mengenai kebebasan pers sangat kecil atau minim sekali. Demikian pula kontrol sosial juga sangat kecil.

d. Sistem pers yang bertanggung jawab sosial

Sistem pers yang bertanggung jawab sosial juga disebut *social pers responsibility*. Sistem ini merupakan penggabungan dari sistem-sistem yang sudah ada dan diformulasikan atau dikonvergensiikan untuk mengemban nilai-nilai yang sesuai dengan kodrat manusia yang hidup di atas bumi ini. Jika dikaji lebih jauh, sistem pers sudah ada dan telah lama dianut dan dilaksanakan oleh bangsa-bangsa di dunia seperti sistem kapitalis, sistem liberalis, sistem komunis, mempunyai kelebihan dan kekurangan setelah dikaji ulang oleh tokoh-tokoh di negara-negara baru, baik itu dari tokoh politik, cendekiawan, agamawan dan sebagainya. Akhirnya melahirkan sistem yang baru yang dinilai cocok, yaitu sistem pers yang bertanggung jawab sosial. Dari sistem ini muncul gagasan-gagasan antara lain sebagai berikut:

1. Kebebasan

Apa artinya liberal atau bebas sebebasnya jika kebebasan itu sendiri yang mutlak tanpa batas, justru akan memuat pesan atau kandungan berita yang akan merusak dari tata nilai kita,

manusia yang secara kodrati atau manusiawi membutuhkan kebebasan.<sup>18</sup>

Bahwa perkataan kebebasan pers itu secara tersurat tidak kita temukan dalam Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 tidak menggunakan istilah kebebasan melainkan kemerdekaan. Kita dapat maklumi penggunaan istilah itu oleh Undang-undang Dasar 1945 mengingat pembentukannya yakni dalam masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa itu istilah merdeka sangat populer.<sup>19</sup> Dan digunakan sebagai seruan dan ajakan dalam setiap pertemuan, ditulis pada tembok-tembok, pada dinding kereta api dan dalam nyanyian-nyanyian yang menggelorakan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa dan negara Indonesia.

Istilah kebebasan lebih sesuai untuk dipakai dalam kehidupan pers daripada istilah kemerdekaan yang lebih sesuai untuk dipakai dalam kehidupan bernegara. JCT. Simorangkir

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 10-12

<sup>19</sup> Krisna Harahap, *Kebebasan Pers di Indonesia*, Cet. I, Grafitri Budi Utami, Bandung, 1996, hal. 41

dalam bukunya *Hukum dan Kebebasan Pers* mempersoalkan betapa pentingnya penggunaan istilah itu secara tepat dengan mengajukan dua pilihan:

- a. Kebebasan pers dalam negara Indonesia yang merdeka.
- b. Kemerdekaan pers dalam negara Indonesia yang bebas.

Tentu saja pilihan akan jatuh pada kebebasan pada kebebasan pers dalam negara Indonesia yang merdeka, seperti telah dikemukakan. Secara harfiah istilah kebebasan pers itu tidak akan kita temukan dalam Undang-undang Dasar 1945 tetapi secara tersirat maknanya. Maknanya merupakan bagian dari kalimat kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan seperti yang termuat dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 memberi cakupan yang luas tidak hanya, mengenai kebebasan pers (*freedom of the press*) tetapi juga mencakup kebebasan berbicara (*freedom of the speech*). Kedua kebebasan tersebut tercakup

dalam *freedom of the expression* atau kebebasan mengeluarkan pendapat yang oleh pasal 8 UUD 1945 dijamin baik dilakukan secara lisan maupun tulisan karena itu pasal ini disebut sebagai akar dari sistem kebebasan pers Indonesia sehingga pada gilirannya pasal ini disebut sebagai akar dari sistem kebebasan pers Indonesia sehingga pada gilirannya pasal tersebut akan menentukan bentuk dan isi konsep dasar dari sistem kebebasan pers tersebut.<sup>20</sup> Sebagai contoh; kita akan merasa risi atau tidak senang dan sebagainya, jika kegiatan kita dari mulai tidur, dan seterusnya selalu diawasi. Mengingat kodrat manusia tersebut, makanya akan lebih baik jika kebebasan itu tidak berlaku mutlak namun masih disertai dengan rasa tanggung jawab tinggi terhadap nilai kodrati manusia atau tanggung jawab sosial dalam kontek yang positif bukan destruktif atau merusak.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 42

<sup>21</sup> Drs. Widodo, *Loc.Cit.*, hal. 12

tiganya pers, pemerintah, dan masyarakat harus mempunyai penekanan yang sama kuatnya dan memperoleh perlakuan yang sama untuk dapat memberikan gambaran dan refleksi yang wajar mengenai masalah pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam situasi negara demokrasi.<sup>25</sup>

## B. Sejarah Pers Indonesia

Mesin cetak masuk ke Hindia Belanda untuk pertama kali pada abad ke-17 dibawa VOC dan penerbitan pers yang pertama kali adalah *Bataviasche Nouvelles* yang terbit pada Agustus 1744, di masa Gubernur Van Imhoff. Sejak itu di tanah Hindia Belanda telah terbit sejumlah penerbitan yang dikelola orang Belanda.

Tentang isi penerbitan itu, seorang pengamat melukiskan, bahwa pada mulanya pers terbit sebagai bagian usaha orang Belanda dan kemudian menjadi pembawa kepentingan perusahaan perkebunan dan industri minyak. Isinya belum mencerminkan persoalan-persoalan politik masa itu karena memang sejak semula pemerintah Belanda mengatur berita-berita yang tidak berbahaya bagi pihak pemerintah sendiri. Pers Belanda sendiri

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 48.

sejak semula merupakan pers resmi karena isinya yang harus di setujui pemerintah baru kemudian ada penerbitan pers yang dapat digolongkan dalam kelompok pers yang tidak resmi.<sup>25</sup>

Menurut catatan sejarah pers, percetakan yang pertama di Indonesia adalah kepunyaan VOC pada tahun 1667. Akan tetapi karena mengalami kebangkrutan, maka alat cetak itu terpaksa dijual kepada dua orang pengusaha swasta Belanda pada tahun 1688,<sup>26</sup> masing-masing bernama Hendrick Brants dan Jan Bruining. Di sekitar tahun 1734 di Jakarta tercatat ada dua buah percetakan yaitu *s'Landzdrukkerij* kepunyaan VOC dan *stadsdrukkerij* kepunyaan swasta.

Surat kabar yang dicetak pertama kali atau terbit pertama kali pada tanggal 7 Agustus 1744, bernama *Bataviasche Nouvelles en Potieque Raisonnementen* atas izin dari Baron Van Imhoff, yang pada waktu itu menjawab sebagai Gubernur Jenderal VOC yang mempunyai pandangan yang agak liberal, tetapi pada tanggal 20 Juni 1746 terpaksa pemimpin surat

---

<sup>25</sup>Kurniawan Junaedhie, *Rahasia Dapur Majalah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal. 27.

<sup>26</sup>T.A. Lathief Rousydiy, *Op.Cit*, hal. 136.

dengan huruf Melayu, bahkan ada kolom berbahasa Jawa (dalam bahasa Jawa dan huruf Jawa) rubrik bahasa penduduk itu sengaja disediakan untuk menyampaikan pengumuman dan advertensi.

Demikian juga pernah beredar di Indonesia surat kabar *Al Jawaib* dengan bahasa dan huruf Arab yang dipimpin oleh Salim Efendi Faris, diterbitkan di Istana Istambul Turki dan disebarkan ke negara: Turki, Mesir, Syira, Sudan, Bomba, Calcutta dan Hindia Belanda, yaitu negeri-negeri yang terdapat penduduknya beragama Islam dan diduga dapat memahami isi mingguan tersebut.

Lembaran-lembaran yang masih ada didapati di Musium Jakarta terbitan tahun XXII, September 1882.<sup>27</sup>

Satu percetakan kecil di Surabaya mencetak "Soerabajasch Advertentieblad" didirikan tahun 1836-1837, sedangkan di Semarang sekitar pertengahan abad itu. Percetakan Oliphant & Co mencetak "Semarangsche Advertentieblad" didirikan tahun 1845-1846, dan "Semarangsche Courent", ditambah buku-buku sekolah dan beberapa pesanan perorangan.<sup>28</sup>

-----  
<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 137.

<sup>28</sup> Edward C. Smith, *Pembredelan Pers di Indonesia*, Pustaka Grafiti Pers, Cet. II, Jakarta Utara, 1986, hal. 54.

Salah satu surat kabar lagi yang terbit di Yogyakarta yang tercatat dalam sejarah pers nasional ialah "Retnodoemilah", terbit di Yogyakarta pada tahun 1895 dan terakhir terbitnya pada tahun 1909. Retnodoemilah digunakan oleh tokoh-tokoh pemimpinnya sebagai salah satu media membentuk pendapat umum. Mereka lantas menjadi pendiri perkumpulan pergerakan bangsa Indonesia yang pertama, yaitu Budi Utomo pada tahun 1908. Mereka adalah Dr. Wahidin Soedirohoesodo, Dr. Radjiman Widijodiningrat dan Ki Hajar Dewantoro. Retnodoemilah dicetak oleh Firma, A.H. Bunning di Yogyakarta.<sup>29</sup> Nomor pertamanya terbit pada tanggal 17 Mei 1895. Terbit dua kali seminggu isinya meliputi soal-soal kebudayaan, filsafat, ruang ilmu pengetahuan kesehatan dan lain-lain. Pernah membuka polemik tentang masalah microben yang mengundang para ahli dari berkalangan dan golongan, bahkan kalangan agama, sehingga tidak lagi semata-mata masalah bakteri tetapi juga merupakan masalah agama.

Surat kabar ini dianggap telah berhasil pada masanya membentuk dan membimbing *public opinion* ke arah kesadaran nasional dalam kaitannya dengan

---

<sup>29</sup>T.A. Lathief Rousydhay, *Oc.Cit.*, hal. 137.

perjuangan kemerdekaan nasional. Di samping itu juga tercatat juga bahwa pers nasional yang membawa suara rakyat dan suara perjuangan kemerdekaan Indonesia ialah mingguan "Medan Prijaji" yang terbit pada tahun 1907 dengan motto *orgaan boeat bangsa yang terperintah di H.O (Hindia Olanda) tempat membuka suaranya anak Hindia*. Mingguan ini dipimpin oleh Djokomono, putra Raden Mas Tumenggung Tirtorejo. Mingguan ini kemudian berubah menjadi harian pada tahun 1910.

Adalah merupakan suatu fakta bahwa perkembangan pers nasional kita selanjutnya sejalan dan seirama dengan kebangkitan nasional.

Hari kebangkitan nasional, 20 Mei 1908 adalah merupakan *starting point* bagi pers kita sebagai alat perjuangan. Dr. Wahidin Soedirohoesodo salah seorang bapak pergerakan nasional sekaligus memimpin majalah "Guru Desa", berusaha menggugah hati nurani rakyat Indoensia melalui medium pers, baik kejiwaannya, mental spiritual maupun fisik materialnya untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Di samping itu juga beliau mengemudikan penerbitan lainnya, yaitu Retnodoemilah yang sudah disebutkan di atas. Pecinta dan pembacanya kebanyakan terdiri dari sasterawan-sasterawan Jawa, khususnya

Jawa Tengah sementara itu "Naitonal Indische Partij" yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro, Dr. Cipto Mangoenkoesoemo dan dan Douwes Dekker di Solo mempunyai "Pengoegah". Redaktur penanggung jawabnya Dr. Cipto Mangoenkoesoemo, sedangkan redaktur hariannya ialah Soetadi. Menurut Soedarjo Tjokrosisworo, Soetadi inilah yang dianggap sebagai pelopor wartawan dan koran Indonesia yang menyajikan berita-berita bergambar pertama kalinya.

Bukan hanya organisasi-organisasi yang berasaskan kebangsaan dan politik saja, organisasi-organisasi yang lebih mementingkan dakwah islamiyah pun seperti Muhammadiyah juga berusaha menerbitkan majalah dan koran. Perserikatan ini dikenal sebagai gerakan Islam. Gerakan da'wah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan tajdid (pembaharuan pemahaman tentang Islam). Selain mempunyai majalah "Suara Muhammadiyah" dan "Suara Aisiyah" juga mempunyai harian "*Adil*" yang terbit di Solo. Harian Adil kemudian berubah menjadi Mingguan dan menjadi Mingguan Islam terbesar menjelang pecahnya Perang Dunia ke-2 yang lalu disamping Panji Masyarakat (pimpinan Buya Hamka) dan Panji Islam (pimpinan Z.A. Ahmad) di Medan, Sumatera Utara.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 138-139

Pada akhir abad ke-19 itu pula mulai tampak adanya penerbitan pers yang bercorak dan berdasarkan satu program politik, karangan-karangan yang disajikan bersikap kritis terhadap politik kolonial Belanda di Hindia Belanda, salah satu majalah yang berpolitik itu adalah, "Bonsblad", yang terbit sejak 1897, sebagai pembawa "Suara Indische Bond", perkumpulan kaum Indo Belanda. Majalah itu dikenal dengan memperjuangkan Hindia Belanda sebagai tanah airnya dan mengusahakan perlakuan yang sama dalam bidang politik mereka.<sup>31</sup>

Pada awal abad 20 penerbitan pers yang dilakukan orang Tionghoa mulai muncul, ketika terbit "Li Po", di Sukabumi pada tanggal 12 Januari 1901 penerbitan itupun diikuti oleh penerbitan pers sejenis, seperti "Kabar Perniagaan", "Siang Po", "Sin Po" dan lain-lain. Serentak dengan itu tradisi penerbitan pers di Indonesia yang dikemukakan oleh kaum Bumi Putra juga dimulai.<sup>32</sup>

Demikian juga para pemuda pelajar tidak mau ketinggalan dalam memperjuangkan kebangkitan nasional melalui pers. Indische Vereeniging, yaitu perkumpulan

---

<sup>31</sup> Kurniawan Junaedhie, *Op.Cit.*, hal. 27

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 27

mahasiswa-mahasiswa yang sedang menuntut pelajaran di Nederland yang berdiri pada tahun 1908 kemudian merubah nama menjadi "Indinesische Vereeniging" pada 1922 juga menerbitkan majalah pada mulanya bernama "Hindia Poetera" kemudian diganti nama menjadi "Indonesia Merdeka". Pemuda pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menuntut pelajaran di Mesir juga tidak mau ketinggalan. Mereka menerbitkan koran berkala dengan nama "Oesaha Pemoeda" terbit di Kairo dibawah pimpinan Abdoellah Aidid dan Ahmad Azhari.

Di dalam negeri pemuda pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Jong Java pada tahun 1914 telah menerbitkan organ Jong Java dengan motto; *Orgaan V.D. Sturenden Jong Java* dengan perserikatan, yaitu perserikatan pemoeda Djawa, Madoera dan Bali dari sekolah pertengahan dan tinggi. Ketika organisasi-oraganisasi pemuda yang masih bersifat kedaerahan ini mengadakan kongresnya di Jakarta pada tahun 1928 lahirlah Indonesia Moeda yang sekaligus mencetuskan sumpah sakti: Satu bangsa, Satu Tanah Air dan Satu Bahasa Persatuan, Indonesia. Organisasi ini kemudian menerbitkan: "Soeara Indonesia Moeda", yang isinya mengumandangkan suara generasi muda Indonesia yang penuh harap akan hari depan tanah airnya.

Demikian pula organisasi-organisasi lainnya yang mempunyai gerakan pemuda sebagai onderbownya, misalnya Muhammadiyah dengan Pemuda Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam Indonesia yang mempunyai pemuda muslimnya, Nahdlatul Ulama dengan gerakan pemuda Anshornya Taman Siswa dengan PPTS dan lain-lainnya juga menerbitkan organnya masing-masing, ada yang berusia lanjut dan ada yang hanya bertahan untuk sementara waktu, kemudian gulung tikar.<sup>33</sup>

Setelah Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 demi kepentingan Jepang dan tentaranya seluruh surat kabar ditutup, termasuk yang diterbitkan Belanda,<sup>34</sup> dan Arab serta lainnya. Surat kabar yang boleh terbit hanya yang mau membela kepentingan Jepang di Indonesia. Pada saat itu, wartawan Indonesia masih terus bekerja keras sekalipun tertekan dan diawasi tentara Jepang.

Para wartawan Indonesia yang ditangkap dan dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda, setelah Jepang berkuasa semuanya dibebaskan. Mereka ini lalu

---

<sup>33</sup>T.A. Lathief Rousyhiy, *Loc.Cit.*, hal. 139

<sup>34</sup>Sulhawi Rubba, *Diktat Pengantar Sejarah Pers nasional*, Cet. II, Lisanalam, Sidoarjo, 1993, hal. 15.

berusaha untuk menerbitkan surat kabar baru, sekalipun mereka mempunyai keyakinan tidak bisa mengeluarkan pendapat secara bebas seperti zaman kolonial Belanda. Para wartawan Indonesia menulis untuk menimbulkan kebencian kepada Belanda dengan memuji bahwa bangsa Asia dapat mengalahkan dominasi kulit putih.

Pada masa pendudukan tentara Jepang, surat kabar yang boleh terbit tercatat antara lain:

- a. Jawa Shimbun di Jawa
- b. Sumatera Shimbun di Sumatera
- c. Borneo Shimbun di Kalimantan
- d. Celebos Shimbun di Sulawesi
- e. Seran Shimbun di pulau Seram
- f. Asia Raya di Batavia (Jakarta)
- g. Tjahaya di Bandung
- h. Sinar Buana di Semarang
- i. Sinar Matahari di Yogyakarta
- j. Suara Asia di Surabaya

Pada masa pendudukan Jepang tersebut banyak sekali wartawan Indonesia yang ditangkap dan dibuang antara lain: Adam Malik, Tri Murty, Pandoe Kartawi Guna, Abdul Hakim, Asmara Hadi, Samawi dan lain-lain.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid.* hal. 15.

### C. Kiprah Pers dalam Pembangunan Bangsa

Sejak proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, orang Indonesia kembali bergairah untuk menerbitkan surat kabarnya hingga akhir tahun 1949 saja, jumlah penerbitan pers telah meningkat pesat. Faktor eksternal yang paling berpengaruh, karena saat itu tak ada ketentuan pembatasan dan pemerintah republik menganjurkan kepada warga pers perjuangan untuk memperbanyak penerbit.

Pada akhir tahun 1949 tercatat data antara lain sebagai berikut:

Penerbitan	Jumlah	Tiras
Indonesia	45	227.000
Belanda	13	102.300
Cina	17	84.000

Sejak proklamasi kemerdekaandan masa-masa berikutnya yang diwarnai dengan Agresi Militer Belanda I dan II, penerbitan pers dimaksudkan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat yang dikenal sebagai pengakuan kedaulatan.

Dua hari setelah proklamasi kemerdekaan dicanangkan, kementerian penerangan berdiri pada bulan September, berdiri Radio Republik Indonesia (RRI), dan sebuah surat kabar harian bernama "Berita Indonesia Terbit".<sup>36</sup>

Pers pada awal pengakuan kedaulatan, Desember 1949 terdapat kurang lebih 75 surat kabar harian dengan jumlah sirkulasi lebih dari 400.000 eksemplar mungkin separuh dari sirkulasi itu dihasilkan dari 45 harian yang diterbitkan dalam tiga bahasa utama: bahasa nasional (bahasa Indonesia), bahasa Jawa dan bahasa Sunda (di Jawa Barat). Selebihnya adalah harian dalam bahasa Belanda serta bahasa Mandarin.

Dalam kegembiraan kemerdekaan ini, pers dan pemerintah bekerja bergandengan tangan erat sekali selama "seratus hari pertama" masa kemerdekaan itu. Pejabat-pejabat pemerintah menyuarakan perasaan yang tepat bahwa kebebasan pers merupakan suatu yang mutlak bagi kebebasan jiwa manusia, keharusan bagi martabat manusia, dan menjadi dasar bagi proses demokrasi. Pemerintah memperlihatkan itikad baiknya terhadap pers dan berusaha membantunya dengan mengimpor dan

---

<sup>36</sup>Kurniawan Junaedhie, *Op.Cit.* hal. 23.

mensubsidi kertas koran, saran paling kritis bagi penerbitan pers di Indonesia, dan dengan memberikan pinjaman keuangan. Juga terdengar suara-suara tentang kodifikasi yang seragam atas undang-undang pers sisa masa lampau dan yang berbeda beda dari tempat yang satu ke tempat yang lain di dalam republik itu.

Semuanya berjalan lancar sampai saat pers bertindak sebagaimana seharusnya pers bertindak, dengan menyerang pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat sampai pada presiden sendiri. Pemerintah yang baru yang belum mantap dan belum yakin akan dirinya sendiri tidak dapat menerima kritik-kritik yang pedas pada tahap ini.

Pola kejadian-kejadian yang berlangsung di Indonesia adalah seperti yang digambarkan Schram, Pye, Lerner, dan lain-lain. Sebagai contoh, Pye berkata: "Di negara yang paling lemah dan tidak mantap sekalipun, media massa masih tetap harus memiliki sampai tingkat tertentu salah satu fungsinya yang paling fundamental; bertindak sebagai inspektur jenderal bagi segenap sistem politik agar dapat memberikan kritik masyarakat yang diperlukan untuk sampai pada tingkatan tertentu menjamin kewibawaan di kalangan pemegang kuasa. Namun, masalah-masalahnya sungguh berat dan sangat rumit, karena ada pula

kebenaran dalam pernyataan bahwa kritik yang berlebihan serta tidak bertanggung jawab terhadap para pejabat pemerintah dapat menghancurkan setiap harapan untuk membangun pola-pola pemerintahan yang konstruktif.

Sesungguhnya penulis-penulis ini, dengan menarik garis umum berdasarkan pengalaman sejumlah negara berkembang, sangat mungkin teringat akan Indonesia.

Tanpa menunjukkan jalan keluar, Pye menyimpulkan. Menganjurkan cita-cita yang murni dari kritik jurnalistik dalam masyarakat seperti itu sama saja tidak menjadi penganut yang taat dari segala apa yang dilakukan pemerintah.

Pers lewat naluri dan tradisi harus menjadi penjaga gawang bagi masyarakat. Demikian karena sifat dan wataknya, pemerintah tidak dapat mengelak dari penelaahan serta serangan yang terus-menerus dari pihak pers. Melihat situasinya, maka akibatnya yang logis adalah timbulnya pertentangan. Dengan penelanjangan pemerintah dan pemimpin-pemimpin masyarakat oleh pers pemerintah tampaknya terangsang untuk mengambil apa yang oleh Indonesia dinamakan "tindakan tegas".<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Edward C. Smith, *Op.Cit.* hal. 81-82.

Pada mulanya, pers mengatakan kepada pemerintah bagaimana menjalankan kewajiban-kewajibannya, saran-saran yang amat diperlukan pemerintah yang belum berpengalaman meskipun hal itu tidak diperlukan atau tidak perlu dilakukannya dengan satir yang pedas, ejekan, ataupun polemik. Dalam masa ini pemerintah sudah menghadapi masalah-masalah yang jauh lebih berat dari pada rongrongan pers.

Pada akhirnya, pecahnya pemberontakan di kalangan tentara dan juga sipil di pulau-pulau luar Jawa --di atas kritik pers yang menjengkelkan-- menjadi beban yang terlampu berat. Pemerintah mulai memukul balik kepada pers. Konflik antara kedua lawan yang tidak berimbang ini berkembang menjadi pertentangan permanen dan pers dipaksa tunduk di bawah kekuasaan otoriter. Cara-cara pengendalian digali dari masa kolonial dan diterapkan dengan semakin ketat sampai 1965.<sup>38</sup>

Tak hanya itu, ada kalanya tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang dimuat dalam penerbitan pers waktu

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 83.

itu dimaksudkan untuk menista seseorang dan akibatnya hal itu mengundang tindakan main hakim sendiri, seperti kasus pengeroyokan maupun pemukulan terhadap wartawan.<sup>39</sup>

Pers pada periode awal Orde Baru, 1966-1974 dapat digambarkan secara kuantitatif dari hasil penelitian Judith B. Agassi (1969), sebagai berikut:

Pada tahun 1966 terdapat 132 harian di Indonesia dengan total tiras 2 juta eksemplar dan mingguan sebanyak 114 buah dengan total tiras 1.542.200 eksemplar. Angka ini menunjukkan kuantitas pers mengalami kenaikan dibandingkan dengan masa Demokrasi terpimpin. Pada tahun 1965 terdapat 11 harian dengan total tiras 1.432.850 eksemplar dari mingguan 84 buah dengan total titar 1.153.800 eksemplar.<sup>40</sup>

Inilah masa-masa yang oleh pengamat pers dianggap sebagai "masa bulan madu" kedua antara pers dan pemerintah karena pada masa itu pers diberi kesempatan sebeb-as-bebasnya dalam menulis dan menyajikan berita jika pada tahun 1865, SIT (Surat Izin Terbit) yang beredar hanya 31 buah, maka pada tahun 1966, di Indonesia beredar sebanyak 50 SIT. Pada

---

<sup>39</sup>Kurniawan Junaedhie, *Op.Cit.* hal. 24-25.

<sup>40</sup>Akhmadi Zaini Abar, *Kisah Pers Indonesia*, LKis, Cet. I, Yogyakarta, 1995, hal. 45.

tahun berikutnya pemerintah mengeluarkan sebanyak 91 SIT baru, dan hingga tahun 197.. saja Deppen telah menerbitkan sebanyak 11, 559, SIT.

Namun menarik, dari hasil pendaftaran ulang yang dilakukan Deppen pada tahun 1975 menunjukkan bahwa tidak semua SIT yang dikeluarkan itu berfungsi efektif dari jumlah itu terbukti formulir yang kembali hanya 475 buah.

Dan yang tak kalah menarik, antara tahun 1971-1972 sebanyak 90 SIT telah dicabut oleh Deppen. Alasannya, karena pelanggaran pornografi dan pemuatan kode judi.<sup>41</sup>

Kenaikan tiras surat kabar harian maupun mingguan pada tahun 1966 ini, terutama disebabkan terbitnya kembali surat kabar-surat kabar lama yang telah dibredel di masa demokrasi terpimpin, seperti Harian Merdeka (terbit kembali Juni 1966), berita Indonesia (terbit kembali Mei 1966), Indonesia Observasi (terbit kembali September 1966) dan lain-lain. Selain itu, telah terbit surat kabar-surat kabar harian baru, seperti Harian "Kami" (Juni 1966), "Angkatan Baru" (Juni 1966), "Angkatan 66" (Juni

---

<sup>41</sup>Kurniawan Junaedhie, *Op.Cit.*, hal. 8.

1966), "Mahasiswa Indonesia" edisi Jakarta Barat (Juni 1966), "Trisakti" (Pebruari 1966), Harian "Operasi" (Mei 1966), Mingguan "Abad Muslimin" (Oktober 1966) dan lain-lain. Tetapi setahun kemudian yaitu tahun 1967 angka itu merosot drastis dibandingkan dengan angka pada tahun 1965 dan beberapa tahun sebelumnya. Surat kabar harian berkurang sebanyak 31 buah sehingga jumlahnya menjadi 101 buah.<sup>42</sup> Dengan total tiras hanya 893.500 eksemplar, sedangkan mingguan berkurang sebanyak 20 buah, sehingga jumlahnya menjadi 94 dengan total tiras 908.950 eksemplar.

Khusus di Jakarta, pada tahun itu terdapat 8 buah harian yang menghentikan penerbitannya, Jawa Barat 1 buah, tetapi di Jawa Timur tak ada yang menghentikan penerbitannya. Di Jawa Tengah justru bertambah satu buah. Di Sumatera terdapat 15 buah yang menghentikan penerbitannya, 9 di antaranya berada di Sumatera Utara. Demikian juga di daerah-daerah lain, kecuali di Nusa Tenggara, banyak surat kabar yang menghentikan penerbitannya, satu hal yang dramatis terjadi di daerah propinsi Sumatera Selatan, Palembang. Menurut Agassi yang mengutip O.G. Roeder

---

<sup>42</sup>Akhmad Zaini Abar, *Op.Cit*, hal. 45.

dalam *Far Eastern Economic Review*, September 1967, tidak satupun harian yang bisa bertahan pada bulan tersebut. Walaupun jumlah penerbit surat kabar yang menghentikan penerbitannya di daerah-daerah tidak sama namun kecenderungan umum menurunnya jumlah penerbitan surat kabar serta total tirasnya di Indonesia telah terjadi di tahun 1967. Pada tahun 1968 dan 1969, penurunan kuantitas pers Indonesia telah/terus berlangsung menurut Agassi, selama paruh akhir tahun 1968 jumlah harian merosot lagi menjadi sekitar 1/10 dari jumlah total tiras harian yang ada di tahun 1966 ini disebabkan adanya faktor yang mempengaruhinya.

Sudah umum diketahui bahwa pada awal kebangkitannya, Orde Baru mewarisi Hiper-Krisis Ekonomi yang mencapai titik puncak yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu penguasa Orde Baru melakukan stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian secara besar-besaran dan drastis. (Mohtar Mas'oed, 1989; Anne Booth dan Peter Mc Cawley, 1982). Program stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian Orde Baru ini, di satu pihak berhasil menurunkan Hiper-Inflasi ke suatu tingkat yang tidak mengkhawatirkan lagi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi di pihak lain program itu menimbulkan krisis

baru dalam masyarakat. Salah satunya, seperti dikatakan oleh Mochtar Mas'ud, adalah dikurangnya subsidi pemerintah di berbagai sektor ekonomi. Bagi dunia pers pada khususnya, kerugian itu sangat terasa ketika subsidi atas harga kertas dihapus.

Hal lain yang juga turut berpengaruh bagi keberadaan atau eksistensi pers dan pertumbuhan pers Indonesia adalah dikurangnya subsidi pemerintah atas transportasi dan komunikasi. Keadaan ini kemudian diperparah lagi oleh naiknya ongkos produksi dan ongkos cetak. Hal ini membuat harga jual dan langganan naik drastis yang mengakibatkan turunnya jumlah pelanggan atau pembeli eceran surat kabar. Harga surat kabar nyaris tak dapat dijangkau oleh rata-rata kemampuan daya beli mereka. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sebagian pemilik surat kabar memilih menghentikan penerbitannya, bagi yang masih bertahan, maka tirasnya pun merosot.

Sebuah ilustrasi yang dialami oleh surat kabar waktu itu dalam situasi krisis tersebut, dikutipkan rubrik KOMPASANIA di harian Kompas yang ditulis oleh almarhum P.K. Ojong sebagai berikut.

..... Dengan kenaikan harga langganan koran dan majalah tentu ada sebagian yang berhenti berlangganan. Dan oplah pers kita yang sudah rendah itu (1,5) juta akan merosot lagi.

Inilah segi yang paling disayangkan dari pers kita itu.... kepada pembaca Kompas yang tetap berlangganan atau pembeli eceran, kami menghaturkan terima kasih kepada pembaca yang keadaan terpaksa, berhenti berlangganan. Kami pun menghaturkan terima kasih atas bantuan di masa lampau dan mudah-mudahan kami akan berjumpa lagi, kalau lewat beberapa minggu Anda akan "biasa" lagi pada harga koran yang tinggi."<sup>43</sup>

#### D. Pers dan Nilai-nilai Pendidikan dalam Islam

Di dunia ketiga, berita mengajar dan berita mendidik adalah bagian penting untuk bisa digunakan untuk menyampaikan pengetahuan tentang berbagai hal yang meliputi penyebarluasan kegiatan kebudayaan, di daerah pedesaan dan perkotaan. Penggunaan media seperti itu tampaknya menjadi suatu kebutuhan.<sup>44</sup>

Eksistensi pers di tengah-tengah masyarakat, mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting, di antara tugas dan fungsi salah satunya adalah sebagai pendidik. Melalui berbagai macam tulisan-tulisan atau pesan-pesan yang dimuatnya. Pers bisa mendidik para audience pembacanya atau masyarakat. Dengan demikian, pers mempunyai andil yang besar dalam memberikan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 46-48

<sup>44</sup> Albert L. Hester, *Pedoman untuk Wartawan*, Terj. Abdullah Alamudi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 52.

pendidikan pada masyarakat/bangsa. Sebagai suatu alat pendidikan berita dapat juga digunakan untuk menetapkan agenda bangsa, Mahatama Gandhi menyatakan nilai berita ini. Salah satu tugas surat kabar adalah memahami perasaan rakyat dan memberinya pernyataan katanya. Lainnya adalah menimbulkan di kalangan rakyat perasaan tertentu yang diharapkan; ketiga adalah tanpa takut-takut mengungkapkan kekurangan di kalangan rakyat atau masyarakat.<sup>45</sup>

Firman Allah Swt.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
 أَمَا يَبْلُغْنَ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا  
 تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنهِرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada Ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S. Al-Isra': 23).

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 52.

Ayat di atas mengandung maksud, bahwa wartawan dan atau pers ketika menyampaikan karyanya hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Dengan demikian apa yang disampaikannya dapat dimengerti, dirasakan dan menjadi hikmah bagi khalayak pembaca. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  
وجادلهم بالتى هي احسن<sup>ة</sup>

Artinya: Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pelajaran yang baik dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. (An-Nahl: 125)

Dalam ayat tersebut, mengandung arti bahwa wartawan muslim dan pers sebagai media yang dibaca oleh masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menjunjung tinggi asas kejujuran dan menyadari betul bahwa akibat dari karyanya akan memiliki pengaruh yang luas terhadap khalayak, karena itu hendaknya semua kegiatan jurnalistiknya ditujukan untuk tujuan-tujuan yang konstruktif dalam pendidikan dan penerangan umat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>H.Oemar, Bakry, *Tafsir Rahmat*, Mutiara Jakarta, 1983, hal. 545.

Tujuan pendidikan Islam pada hakekatnya menginginkan terwujudnya manusia muslim yang berkualitas, yang seimbang aspek jasmani dan rohani, individual dan sosialnya sehingga dapat berfungsi dan berperan optimal baik sebagai hamba Allah maupun kholifahnya. Karena itulah pendidikan Islam keberatan terhadap konsep pendidikan yang memprioritaskan pengembangan kepribadian manusia pada aspek tertentu saja dengan mengabaikan yang lainnya, seperti konsep pendidikan *Humanistic Mental Discipline* yang mengembangkan intelek semata, seperti diobsesikan John Loicke, juga tidak menerima konsep yang bertujuan menciptakan manusia alamiah yang individualistis seperti dikembangkan Roesseau, terlebih lagi karena konsep tersebut didasarkan atas asas utilitarianisme dan pragmatisme sedangkan pendidikan Islam menempatkan iman dan kesalehan serta kebaikan hidup berdasarkan tuntunan Illahi sebagai tujuan fundamental dalam setiap pendidikan yang diselenggarakannya.

Berkenaan dengan dasar-dasar pokok pendidikan tampaknya hampir semua penyelenggaraan pendidikan memiliki seperangkat konsep/nilai yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan pendidikannya agar tetap fungsional dalam mewujudkan tujuan yang dicita-

citakannya. Dalam Islam misalnya, seperti diulas oleh para pakar, dasar-dasar pokok penyelenggaraan pendidikan Islam terdiri dari atas : (1) tanggung jawab individu dan masyarakat (2) universal (3) teoritis dan praktis (4) terbuka bagi perubahan/perkembangan ilmu pengetahuan; dan (5) melestarikan kemurnian ajaran Islam.

Rumusan tentang arti pendidikan, banyak kita temukan dalam buku-buku yang membahas tentang pendidikan kalau dicermati secara mendalam maka pengertian tersebut bermuara pada dua macam pendirian.

*Pertama*, pandangan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah proses enkulturasi atau pewarisan dan sosialisasi perilaku sosial yang telah menjadi model anutan masyarakat lingkungannya secara baku. *Kedua*, pandangan yang mengartikan bahwa pendidikan sebagai suatu upaya fasilitatif demi terwujudnya situasi atau potensi dasar.<sup>48</sup>

Pandangan pertama didasarkan pada essensialisme yang sadar akan banyaknya nilai-nilai pendidikan yang berisi norma-norma yang telah teruji dan terseleksi

---

<sup>48</sup>Muslih Usa dan Ade Widjdan SZ, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Aditya Media, Cet. I, Yogyakarta, 1997, hal. 69.

oleh sejarah, yaitu berupa nilai-nilai luhur yang mesti dilestarikan dan diwariskan kepada generasi mendatang. Sedangkan yang kedua, didasarkan atas progressivisme yang merekayasa kebudayaan lama sebagai persiapan menghadapi orde kebudayaan mendatang melalui proses sosialisasi.